|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERJANJIAN KERJASAMA**  **ANTARA**  **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  **DENGAN**  **SAMUDERA SHIPPING LINE (SSL)**  **TENTANG**  **Jaminan Tingkat Pelayanan**  **BONGKAR/MUAT Peti Kemas Internasional**  **di Belawan TERMINAL PETIKEMAS FASE II**  **Nomor :**  **Nomor :**  Pada hari ini \_\_\_\_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_\_\_\_ tahun dua ribu sembilan belas belas di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini   1. **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**, didirikan berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No. 162 tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H, notaris di Medan, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-46327.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 03 September 2013, yang Anggaran Dasarnya terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT. Prima Terminal Petikemas Nomor: 36 tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Henry Tjong, SH, notaris di Medan, yang persetujuan perubahannya telah disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0065206.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 22 September 2020, dalam hal ini diwakili oleh **AGUS WILARSO**, selaku Direktur Operasi dan Teknik PT Prima Terminal Petikemas, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 11 tanggal 15 Maret 2019, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0189855 tanggal 05 April 2019, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Prima Terminal Petikemas, selanjutnya disebut  **PTP.** 2. **SAMUDERA SHIPPING LINE LTD**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dengan kantor berada di 6 Raffles Quay #25-01 Singapura, 048580. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bani Maulana Mulia dalam kapasitasnya sebagai Executive Director & CEO Samudera Shipping Line Ltd dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Samudera Shipping Line Ltd berdasarkan Anggaran Dasar dan perubahannya sebagaimana disebutkan dalam Memorandum And Articles of Association tanggal 22 Desember 1993 dan terakhir diubah berdasarkan Accounting And Corporate Regulatory Authority Bussiness Profile tanggal 28 April 2021, selanjutnya disebut SSL.   PTP dan SSL selanjutnya secara bersama-sama disebut “Para Pihak”.  Para Pihak setuju dan sepakat untuk menandatangani perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :  **PASAL 1**  **DEFINISI**  Istilah-istilah berikut apabila digunakan dalam perjanjian ini memiliki arti sebagai berikut :   1. “Kapal” adalah kapal petikemas milik maupun yang disewa oleh SSL. 2. *“*Berthing Time*”* adalah jangka waktu kapal sandar di dermaga sejak ikat tali pertama (first line) sampai lepas tali (last line). 3. *“*Berthing windows*”* adalah hari/waktu yang dialokasikan kepada SSL untuk melakukan kegiatan bongkar muat di terminal PTP berdasarkan kesepakatan Para Pihak.    * 1. “Keterlambatan” adalah Kapal SSL terlambat sandar melebihi maximal 6 (enam) jam dari berthing window yang ditetapkan di terminal PTP. 4. “Produktivitas bongkar muat peti kemas yang dinyatakan dalam satuan BSH (Box Ship Hour)” adalah rata-rata jumlah produksi bongkar muat petikemas per jam yang dihitung sejak pembongkaran pertama sampai pemuatan terakhir (diluar Kepabeanan, Imigrasi, Karantina, Otoritas Pelabuhan dan waktu istirahat). 5. “Tarif” adalah biaya jasa pelabuhan yang dipungut oleh PTP kepada SSL atas pelayanan yang diberikan selama di Terminal Petikemas. 6. “Terminal Petikemas” adalah Terminal untuk lokasi kegiatan bongkar muat dan penumpukan petikemas. 7. “Baplie” adalah dokumen dengan standard *United Nation/Electronic Data Interchange for Adminsitration, Commerce & Transport* (UN/EDIFACT) yang berisikan data bongkaran/muatan diatas kapal. 8. “Coari” adalah dokumen dengan standard *United Nation/Electronic Data Interchange for Adminsitration, Commerce & Transport* (UN/EDIFACT) yang berisikan data bongkaran/muatan yang telah dibongkar/dimuat dari dan ke kapal. 9. Codeco adalah dokumen dengan standard *United Nation/Electronic Data Interchange for Adminsitration, Commerce & Transport* (UN/EDIFACT) yang berisikan data petikemas yang telah masuk/keluar melalui *gate* terminal.   **PASAL 2**  **DASAR PERJANJIAN**   1. Dasar/Referensi pekerjaan ini adalah 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pelayaran. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tanggal 14 November 2009 tentang Kepelabuhanan. 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 6. *Minutes of Meeting* antara SSL dengan PTP tanggal 02 September 2021 tentang rencana pembuatan SLA/SLG atas pelayananan terhadap kegiatan SSL. 7. Dasar/Referensi sebagaimana tersebut ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya denganperjanjian ini.   **PASAL 3**  **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**  Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pelayanan petikemas internasional untuk kegiatan sebagai berikut   1. Berthing Windows 2. Produktivitas Bongkar Muat 3. Tarif 4. Pelaporan; dan 5. Klaim.   **PASAL 4**  **HAK DAN KEWAJIBAN**   1. Berthing Windows 2. PTP akan menetapkan jadwal tambat untuk kapal milik SSL setiap hari ....... pukul .......... WIB sampai dengan hari ..............pukul ............ WIB untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat petikemas internasional. *Berthing Windows* dapat berubah dan dikaji ulang oleh kedua belah pihak. 3. Apabila terjadi keterlambatan tambat kapal yang diakibatkan oleh SSL, maka SSL akan diberikan tambahan waktu maksimal 6 (enam) jam dari waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan butir a ayat ini, selama tidak mengganggu waktu *berthing* kapal berikutnya. 4. Apabila tambahan waktu pada butir b di atas telah berakhir dan terdapat kapal berikut yang akan sandar, maka SSL bersedia mengosongkan dermaga untuk pelayanan kapal berikut walaupun kegiatan bongkar muat belum selesai. 5. Perhitungan keterlambatan sandar dan keberangkatan kapal sesuai butir b ayat ini tidak termasuk apabila terjadi pasang surut/pengaruh alam yang mengakibatkan kapal SSL terlambat untuk sandar dan berangkat dari pelabuhan. 6. Produktivitas bongkar muat peti kemas 7. PTP menjamin produktivitas bongkar/muat sebagai berikut :  |  |  |  | | --- | --- | --- | | No. | LOA | B/S/H | | 1. | ≤ 120 meter | 21 | | 2. | > 120 meter | 40 |  1. Apabila terjadi keterlambatan tambat kapal dan atau pelayanan operasional yang diakibatkan oleh PTP sehingga produktivitas tidak terpenuhi, maka kepada SSL diberikan tambahan waktu tambat hingga kegiatan bongkar muat selesai maksimal 6 (enam) jam dari *berthing windows*. 2. Jaminan Pelayanan Pandu   PTP memberikan jaminan pelayanan pemanduan selama 24 (dua puluh empat) jam dengan waktu tunggu pandu (waiting time) selama 1 (satu) jam.   1. PTP akan mengenakan tarif bongkar muat petikemas kepada SSL sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan PTP. 2. Segala ketentuan CIQP (*Custom, Imigration, Quarantine, Port Master*) terkait pelaksanaan kegiatan Bongkar Muat kapal SSL akan diselesaikan oleh SSL kepada instansi terkait   **PASAL 5**  **PELAPORAN**   1. SSL wajib menyampaikan laporan kepada PTP berupa *Master Cable*, Pemberitahuan identifikasi kapal peti kemas (CVIA), daftar barang berbahaya, daftar peti kemas reefer, manifest, dan daftar cargo khusus, melalui e-mail dan atau hard copy selambat-lambatnya 20 (dua puluh ) jam sebelum kapal tambat. 2. PTP akan menyampaikan hasil penetapan penyandaran kapal kepada SSL melalui e-mail minimal 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal tambat dan laporan keberangkatan kapal maksimal 4 (empat) jam setelah kapal berangkat. 3. SSL wajib mengirimkan data bongkaran kapal (Baplie Bongkaran) melalui e-mail selambat-lambatnya 3 (tiga) jam sebelum kapal tambat. 4. PTP wajib mengirimkan data muatan kapal (Baplie Muatan) dan Terminal Departure Report (TDR) selambat-lambatnya 4 (empat) jam setelah kapal lepas tambat. 5. PTP wajib mengirimkan data Codeco kepada SSL melalui e-mail setiap 3 (tiga) jam. 6. PTP wajib mengirimkan data Coari kepada SSL melalui e-mail setiap 3 (tiga) jam selama kapal tambat.   **PASAL 6**  **KLAIM**   1. Apabila terjadi kerusakan dan atau kehilangan bagian kapal, petikemas sebagai akibat pelayanan PTP , maka Para Pihak wajib membuat Berita Acara kerusakan dan atau kehilangan yang ditandatangani oleh pejabat kapal yang berwenang dan pihak yang ditunjuk oleh PTP dengan melampirkan bukti pendukung dengan mencantumkan nama dan jabatan yang jelas sesuai ketentuan PTP 2. SSL wajib mengajukan pemberitahuan klaim secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja untuk pemberitahuan awal setelah terjadinya kerusakan dan atau kehilangan bagian kapal dan atau peti kemas kepada PTP dan diberikan waktu selambat-lambatnya 23 (dua puluh tiga) hari sejak kejadian untuk melengkapi kekurangan bukti/dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku di PTP. 3. PTP akan memberikan jawaban secara tertulis kepada SSL selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat pengajuan klaim diterima oleh PTP. 4. Apabila PTP menyetujui klaim yang diajukan SSL, maka PTP wajib melakukan pembayaran klaim dimaksud selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kwitansi diterima dari SSL.   **PASAL 7**  **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**   1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak. 2. Pihak yang akan memperpanjang perjanjian memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini. 3. PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini berakhir dengan ketentuan :    1. Memberikan surat pemberitahuan minimal 30 (tiga puluh) hari.    2. Menyelesaikan segala kewajiban yang berkaitan dengan administrasi berdasarkan Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani PARA PIHAK.   **PASAL 8**  **FORCE MAJEURE**   1. Yang dimaksud *force majeure* adalah suatu keadaan seperti peperangan, kerusuhan, revolusi dan bencana alam yang terjadi diluar kehendak Para Pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini tidak dapat dipenuhi. 2. Para Pihak akan dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajiban yang disebabkan keadaan *force majeure.*   Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahu Pihak lainnya tanpa menunda, paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah kejadian *Force Majeure* dengan menyebutkan kejadian dan tingkat kerusakan.  **PASAL 9**  **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**   1. Pemutusan perjanjian sebelum berakhir jangka waktunya dapat terjadi apabila : 2. Salah satu PIHAK melanggar satu atau lebih dari kewajiban-kewajiban yang telah disepakati bersama dalam perjanjian ini, dan PIHAK yang lain memiliki bukti mengenai pelanggaran tersebut, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang melakukan pelanggaran tersebut telah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender antara peringatan yang satu dengan peringatan berikutnya. 3. Salah satu pihak dinyatakan pailit/bangkrut atau dinyatakan dibubarkan, berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap dan dinyatakan bahwa pihak tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi. 4. Salah satu Pihak dicabut ijin usahanya oleh pihak yang berwenang sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. 5. Sebelum dilaksanakan pengakhiran Perjanjian ini, Pihak yang menginginkan pemutusan perjanjian diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak yang lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian ini. Jangka waktu 90 hari tersebut dihitung setelah berakhirnya jangka waktu peringatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini. 6. PARA PIHAK dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang mengatur mengenai kewajiban memperoleh putusan/keputusan pengadilan atau hakim atas pengakhiran Perjanjian ini, dan dengan demikian Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak atau dapat berakhir sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tanpa diperlukan adanya putusan/keputusan dari pengadilan dan/atau hakim manapun.   **PASAL 10**  **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**   1. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, Para PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah 2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK setuju untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada Pengadilan Negeri Medan. 3. Adanya perselisihan tersebut tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian.   **PASAL 11**  **LAIN-LAIN**   1. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sepanjang terjemahannya memberikan pengertian yang sama antara PARA PIHAK, apabila terdapat perbedaan pengertian diantara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka Bahasa Indonesia yang berlaku. 2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu oleh PARA PIHAK, serta perubahan-perubahan atau penambahan-penambahannya diatur dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 3. Perjanjian ini serta seluruh hak, kepentingan, atau kewajiban tidak akan dialihkan oleh salah satu pihak dalam Perjanjian ini (baik karena hukum atau lainnya) tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain. 4. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan dibubuhi materai secukupnya pada asli pertama dan asli kedua serta 1 (satu) lainnya (copy) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. | **COOPERATION AGREEMENT**  **BETWEEN**  **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  **AND**  **SAMUDERA SHIPPING LINE (SSL)**  **REGARDING**  **THE GUARANTEED SERVICE LEVEL OF INTERNATIONAL CONTAINER LOADING AND UNLOADING AT BELAWAN CONTAINER TERMINAL FASE II**  **Number :**  **Number :**  This \_\_\_\_\_\_\_, the \_\_\_\_\_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_\_\_\_ two thousand and nineteen in Medan, an agreement is entered into and made by and between the undersigned:   1. **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**, was established based on the Deed of Establishment/ Articles of Association no. 162 dated 30 July 2013, drawn up before Rahmad Nauli Siregar, SH, notary in Medan, and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-46327.AH.01.01 of 2013 dated 03 September 2013, whose Articles of Association were the last time Amended by the Deed of Decision of the Shareholders of PT. Prima Terminal Petikemas Number: 36 dated July 30, 2020, drawn up before Henry Tjong, SH, a notary in Medan, whose amendment approval has been stored in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-0065206.AH . 01.02 of 2020 dated 22 September 2020, in this case represented by AGUS WILARSO, as Director of Operations and Engineering of PT Prima Terminal Petikemas, based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions Number 11 dated 15 March 2019, which has been received and recorded in the Ministry of Legal Entity Administration System Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.03-0189855 dated April 5, 2019, from and therefore acting for and on behalf of PT Prima Terminal Petikemas, hereinafter referred to as the  **PTP**. 2. **SAMUDERA SHIPPING LINE LTD**, a company incorporated under the laws of Singapore with office located at 6 Raffles Quay #25-01 Singapore, 048580. In this case, represented by Bani Maulana Mulia in his capacity as Executive Director & CEO of Samudera Shipping Line Ltd in this case act for and on behalf of Samudera Shipping Line Ltd based on the Articles of Association and its amendments as stated in the Memorandum And Articles of Association dated December 22, 1993 and lastly amended based on the Accounting And Corporate Regulatory Authority Business Profile dated April 28, 2021, hereinafter referred to as SSL.   PTP and SSL Hereinafter collectively referred to as the “Parties.”  The Parties here to agree and accord to enter into this Agreement under the following terms and conditions:  **ARTICLE 1**  **DEFINITIONS**  In this Agreement the following terms shall possess the following meanings:   1. ”Vessel” shall mean any container vessel which is either owned or leased by the SSL. 2. “ Berthing Time” shall mean a particular period of time during which a Vessel berths, counting from the first line up to the last line. 3. “Berthing Windows” shall mean any day or time which is allocated to the Party of SSL for the conduct of loading and unloading activities at the PTP terminal based on mutual agreement. 4. “Delay” shall mean the delay time of SSL vessel exceeding 6 (six) hours at the maximum from the berthing window time set at the PTP’s terminal. 5. ”Box Ship Hour” shall mean the average number of containers loaded and unloaded per hour, counting from the common discharge untill complete loading (excluded CIQP and rest time) 6. ”Rate” shall mean a particular amount of port service fee which is to be charged by PTP on SSL for the services rendered at the Container Terminal. 7. “Container Terminal” shall mean a particular terminal at which container loading, unloading and stacking are conducted for export and import purposes. 8. “Baplie” shall mean a standard document under the United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce & Transport (UN/EDIFACT) stating the particulars of cargoes loaded into and unloaded from the Vessel. 9. “Coari” shall mean a standard document under the United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce & Transport (UN/EDIFACT) stating the particulars of cargoes loaded into and unloaded from the Vessel 10. “Codeco” shall mean another standard document under the United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce & Transport (UN/EDIFACT) stating the particulars of containers loaded into and unloaded from gate terminal.   **ARTICLE 2**  **LEGAL BASES OF THE AGREEMENT**   1. The work hereunder shall be based upon: 2. Law No. 17 of 2008, dated May 7th, 2008, regarding Shipping Activities. 3. Government Regulation No. 61 of 2009, dated November 14th, 2009, regarding Ports Affairs. 4. Decree of Minister of Communications No. PM 146 of 2016, dated December 5th, 2015, regarding the Amendments of Decree of Minister of Transportation No. PM 51 of 2015, dated February 23th concerning Operations of Sea Ports. 5. Government Regulation Number 31 of 2021 concerning the Implementation of the Shipping Sector 6. Minutes of Meeting between SSL with PTP dated September 2, 2021 regarding the plan to make SLA/SLG for services to SSL’s activities 7. The above reference/bases shall form an inseparable and integral to this Agreement   **ARTICLE 3**  **SCOPE OF AGREEMENT**  This Agreement shall cover international container services for the following activities:   1. Berthing Windows; 2. Box Ship Hour; 3. Rate: 4. Reports; and 5. Claims.   **ARTICLE 4**  **RIGHTS AND OBLIGATIONS**   1. Berthing Windows 2. PTP will determine the mooring schedule for ships belonging to the SSL every day ....... at .......... WIB until the day ..............at ............ WIB to carry out international container loading and unloading activities. Berthing Windows may be change and subject to review by both parties. 3. In the event of delay in vessel mooring caused by SSL, SSL shall be given additional time up to 6 (six) hours at the maximum from the time set in accordance with point a of this paragraph, as long as it does not impact the next vessel berthing window. 4. If additional time in item b as mentioned above has expired and there is another vessel will be served, then SSL are willing to vacate berth for next vessel service although the working activities have not finished yet. 5. The calculation for delay of berthing and existing vessel refer to point b of this paragraph shall not include in the event of tidal/natural influences that cause SSL’s vessel late for berthing and exiting port. 6. Box Ship Hours 7. PTP warrants a loading and unloading productivity, as follows :  |  |  |  | | --- | --- | --- | | No. | LOA | B/S/H | | 1. | ≤ 120 meter | 21 | | 2. | > 120 meter | 40 |  1. In the event delay in the mooring of the vessel and or operational service caused by PTP resulting the productivity is not fulfilled, then SSL will be given additional mooring time until finish load and unload activity within 6 (six) hours at the maximum from berthing windows.      1. Pilot Service Guarantee.   PTP guarantees the Pilot service for 24 (twenty four) hours and the waiting time within 1 (one) hour.   1. PTP shall charge tarif of loading and discharging of container to SSL pursuant to the applicable provisions applied in PTP. 2. Any and all CIQP conditions (Custom, Imigration, Quarantine, Port Mater) relating to the performance of loading and unloading activities onboard of SSL’s Vessels shall be fulfilled by the SSL to the related agencies.   **ARTICLE 5**  **Reports**   1. SSL shall be required to make reports to PTP namely Master Cable, notice of container vessel particulars (CVIA), lists of hazardous materials, lists of reefer containers, and manifests list of special cargoes, by e-mail or hard copy the latest within 20 (twenty) hours prior to vessel berthing. 2. PTP shall submit the letter of determination of vessel berthing to SSL by email not less than 24 (twenty-four) hours prior the berthing and vessel departure reports not later than four 4 (Four) hours after the departure of the vessel. 3. SSL shall be required to send unloading Baplies by e-mail not later than three 3(Three) hours prior to vessel berthing times. 4. PTP shall be required to send the particulars of loading Baplies and terminal departure report not later than 4 (four) hours after the departure of the vessel or last line. 5. PTP shall be required to send Codeco particulars to SSL by e-mail every 3 (three) hours. 6. PTP shall be required to send Coari particulars to SSL by e-mail every 3 (Three) hours during a Vessel’s berthing time.   **ARTICLE 6**  **CLAIMS**   1. In the event of damage and or loss occurred to the part of the Vessel, container(s) as a result PTP’s services rendered, then the Parties shall be required to make the minutes of damage and or loss signed by the authorized vessel officers and a particular person designated by PTP, enclosing supporting evidences and stating full names and titles in accordance with the conditions set out by PTP. 2. SSL shall be required to present a claim in writing not later than 7 (seven) business days as an initial notice subsequent to damage to and/or loss of part of a Vessel and/or container to PTP and shall be given an opportunity of not later than 23 (twenty three) days subsequent to complete supporting evidence/ documentation under the rules adopted by PTP. 3. PTP shall send a response in writing to SSL not later than five (5) business days commencing from the claim receipt by PTP. 4. Should PTP agree to such claim, PTP shall be required to make payment for such claim not later than 30 (thirty) business days upon the receipt of proof of payment from SSL.   **ARTICLE 7**  **TERM OF AGREEMENT**   1. This Agreement shall be valid for a term of 1 (one) year since the signing date of this Agreement and may be extended upon mutual consent by the Parties. 2. The Party wishing to extend this Agreement shall serve a notice in writing no later than 30 (thirty) days prior to the expiry of this Agreement. 3. The PARTIES shall terminate this Agreement earlier before the expiry date as referred to in Paragraph (1) of this Article with the provisions :   a. Provide a notification letter of at least 30 (thirty) days.  b. Complete all obligations related to administration based on the Minutes of Agreement signed by the PARTIES.  **ARTICLE 8**  **FORCE MAJEURE EVENTS**   * 1. Force majeure events shall mean such events as warfare, rioting, revolution, acts of God, which may occur beyond the control of the Parties, therefore the obligations of the Parties herein incapable to be fulfilled.   2. The Parties shall not be liable for any delay or failure to perform under this Agreement which caused by any Force Majeure events. The Party affected by Force Majeure events shall notify the other Party without undue delay at the latest within 3 (three) business days following the commencement of the Force Majeure events setting out the nature and extent of the Force Majeure events.   **ARTICLE 9**  **TERMINATION**   1. This Agreement may be terminated earlier prior to the expiry date if: 2. Either party hereto commits a breach of one or more of its obligations hereunder and the other possesses evidence of such a breach, provided that the defaulting Party has been served with a warning in writing in 3 (three) occasions within 7 (seven) calendar days period between one and another warning. 3. Either party hereto is declared to be bankrupt or dissolved by an order of a district court which have valid and binding effect and stipulated that such party cannot fulfilled its obligations. 4. Either party hereto has its business permit being revoked by the competent authorities therefore it is incapable of performing its obligations hereunder. 5. Prior to termination of this Agreement, the intending Party shall be required to serve a notice in writing on the other not less than a period of 90 (ninety) calendar days in advance. Such a period shall count from the elapse of the warning period set forth in section (1) of this article. 6. The Parties hereto hereby waive the provisions of Article 1266 of the Civil Code with respect to the need for a court order to terminate this Agreement to the extent a court decision or judgment is required for termination of this Agreement, and therefore this Agreement might be terminated by the Parties or might be terminated in accordance with the terms and conditions set out in this Agreement without requiring any decision from court and / or any judges.   **ARTICLE 10**  **DISPUTE RESOLUTION**   1. The Parties hereto agree that any dispute which may arise from the performance of this Agreement shall be settled amicably. 2. Should such disputes cannot be resolved amicably, then the Parties hereto further agree to refer such a dispute to be resolved through District Court of Medan. 3. Such a dispute shall not relieve the Parties hereto of the fulfillment of their respective obligations hereunder.   **ARTICLE 11**  **MISCELLANEOUS**   1. This agreement is made in Bahasa Indonesia and translated into English, each of which possesses equal legal force as long as its translation have the same understanding between the parties hereto, in the event of discrepancies between the English version and the Bahasa version, the Bahasa Indonesia version shall prevail. 2. Any matters which are not or insufficiently regulated and deemed to be necessary by the Parties hereto and any amendments hereto shall be resolved upon in an addendum which shall form part hereof. 3. **Neither this**Agreement nor any of the rights, interests or obligations hereunder shall be assigned by any of the PARTIES hereto (whether by operation of law or otherwise) without the prior written consent of the other parties. 4. This Agreement is made in 3 (three) counterparts, each of which affixed with stamp duty in one original and second original as well as 1(one) other, copy, each of which possesses equal legal force and effect. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Demikian perjanjian ini dibuat oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana tersebut diatas.  *:* dalam *jam*, dan berl3 POD atau lebih  SAMUDERA SHIPPING LINE LTD  BANI MAULANA MULIA | Therefore this agreement is entered into by the PARTIES on the date as mentioned above.  PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS  AGUS WILARSO |